



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang perizinan, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 03, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Usaha Penyewaan Konsol Permainan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);
25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5)
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Trotoar Sebagai Jalan Keluar/Masuk Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2009 Nomor 19);
30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Izin Penebangan Pohon dan Izin Pemindahan Taman (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 43);
31. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 44);
32. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 52);
33. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 19);

34. Peraturan ...

34. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 20);
35. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung Internet dan Warung *Playstation* (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 41);
36. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);
37. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 68);
38. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 47) huruf c diubah dan dalam ketentuan huruf g ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

- a. sektor perencanaan dan pembangunan daerah, sebagai berikut:
 1. surat izin prinsip pemanfaatan ruang;
 2. izin lokasi; dan
 3. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- b. sektor penanaman modal, sebagai berikut:
 1. izin prinsip penanaman modal;
 2. izin prinsip perluasan penanaman modal;
 3. izin prinsip perubahan penanaman modal;
 4. izin usaha perluasan;
 5. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*); dan
 6. izin usaha perubahan;
- c. sektor kesehatan, sebagai berikut:
 1. surat izin praktek (SIP) dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 2. surat izin praktik bidan (SIKB) pada sarana pelayanan kesehatan;
 3. surat izin praktek bidan (SIPB) perseorangan dan/atau berkelompok;
 4. surat izin praktek perawat [SIPP] perseorangan dan/atau berkelompok;

5. surat ...

5. surat izin praktik perawat gigi (SIPPG);
6. surat izin kerja perawat gigi (SIKPG);
7. surat izin kerja perawat anestesis (SIKPA);
8. surat izin praktik apoteker (SIPA) bagi apoteker penanggung jawab/apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
9. surat izin praktik tenaga gizi (SIPTGz);
10. surat izin kerja tenaga gizi (SIKTGz);
11. surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS)
12. surat izin kerja apoteker (SIKA) bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran;
13. surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;
14. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) pada sarana pelayanan kesehatan;
15. surat izin kerja fisiotrapis (SIKF)
16. surat izin praktek fisioterapis (SIPF) perseorangan dan/atau berkelompok;
17. surat izin praktek terapi wicara (SIPTW) pada sarana pelayanan kesehatan;
18. surat izin kerja terapi wicara (SIKTW);
19. surat izin praktik okupasi terapis (SIPOT)
20. surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
21. surat izin kerja radiografer (SIKR);
22. surat izin kerja teknisi gigi (SIKTG);
23. surat izin praktik ortoris prosthesis (SIPOP);
24. surat izin kerja ortoris prostetis (SIKOP);
25. surat izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIPATLM);
26. surat izin praktik tehnik elektromedis (SIP-E)
27. surat izin apotek (SIA);
28. surat izin kerja perekam medik;

29. surat ...

29. surat izin apotek rakyat/toko obat;
 30. surat izin optikal/laboratorium optikal;
 31. surat izin pembaharuan optikal/laboratorium optikal;
 32. surat izin operasional sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
 33. surat izin mendirikan sementara/tetap rumah sakit kelas C dan D;
 34. izin klinik utama/pratama;
 35. izin mendirikan lembaga rehabilitasi medis (lembaga tertentu) penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 36. izin pelayanan radiologi diagnostik;
 37. izin operasional pemberantasan hama; dan
 38. izin operasional unit tranfusi darah;
- d. sektor pekerjaan umum, sebagai berikut:
1. izin mendirikan bangunan (IMB);
 2. surat izin usaha jasa konstruksi;
 3. surat izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan;
 4. surat izin pemakaian kekayaan daerah irigasi;
 5. surat izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik /telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/telepon;
- e. sektor perhubungan, sebagai berikut:
1. surat izin trayek baru mobil penumpang umum (MPU)/mikrobus/angkutan antar jemput/sewa dalam kota;
 2. surat izin trayek pembaharuan masa berlaku Keputusan Izin Trayek (mikrobus/MPU/ angkutan antar jemput/sewa);
 3. surat izin trayek/operasi perubahan trayek (mikrobus/MPU);
 4. surat izin trayek/operasi pengalihan kepemilikan (mikrobus/MPU);
 5. surat ...

5. surat izin trayek penggantian Keputusan Izin Trayek rusak/hilang (mikrobus/MPU); dan
 6. surat izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan/atau barang dalam kota;
- f. sektor pariwisata, sebagai berikut:
- tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), meliputi bidang usaha:
1. jasa transportasi wisata;
 2. jasa perjalanan wisata;
 3. jasa makanan dan minuman;
 4. jasa informasi kepariwisataan;
 5. jasa konsultan pariwisata;
 6. jasa pramuwisata;
 7. penyediaan akomodasi;
 8. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
 9. penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran;
 10. daya tarik wisata;
 11. kawasan wisata;
 12. wisata tirta; dan
 13. *Solus Per Aqua* (SPA);
- g. sektor pendidikan, sebagai berikut:
1. surat izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. surat izin operasional penyelenggaraan kursus;
 3. surat izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3a. surat izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - 3b. perpanjangan izin operasional satuan pendidikan;
- h. sektor perindustrian dan perdagangan, sebagai berikut:
1. surat izin usaha industri melalui persetujuan prinsip;

2. surat ...

2. surat izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
 3. surat izin perluasan usaha industri melalui persetujuan prinsip;
 4. surat izin perluasan usaha industri tanpa persetujuan prinsip;
 5. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 6. surat izin usaha industri depot air minum;
 7. surat izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
 8. surat izin usaha toko modern (IUTM);
 9. surat izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
 10. surat izin penyelenggaraan pemasangan reklame;
 11. surat izin tanda daftar perusahaan (TDP);
 12. surat izin tanda daftar gudang (TDG); dan
 13. dihapus;
- i. sektor lingkungan hidup, sebagai berikut:
1. surat izin lingkungan;
 2. surat izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. surat izin pembuangan air limbah; dan
 4. surat izin penebangan pohon dan pemindahan taman;
- j. sektor telekomunikasi, yakni surat izin usaha warung *internet* dan usaha penyewaan konsol permainan;
- k. sektor koperasi, sebagai berikut:
1. izin usaha simpan pinjam koperasi; dan
 2. izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah Koperasi;
- l. sektor pertanian, sebagai berikut:
1. izin usaha tanaman pangan, terdiri atas:
 - a. izin usaha proses produksi;
 - b. izin usaha penanganan pasca panen;
 - c. izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen; dan
 - d. izin usaha perbenihan tanaman;

2. izin ...

2. izin usaha hortikultura, terdiri atas:
 - a. izin usaha budidaya hortikultura; dan
 - b. izin usaha perbenihan hortikultura;
 3. izin usaha perkebunan, terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan (IUP-B);
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan (IUP-P);
 - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP); dan
 - d. usaha produksi perbenihan tanaman;
 4. izin usaha peternakan; dan
 5. izin usaha obat hewan untuk produsen;
- m. sektor permukiman, yakni surat izin usaha pemondokan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 April 2020

Plt, WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 18